

STRATEGI PENGENDALIAN IMPOR MACKAREL SEBAGAI BAHAN BAKU USAHA PEMINDANGAN

Mackarel Importation Control Strategy As Raw Material For Boiled Fish Industries

***Freshty Yulia Arthatiani dan Rismutia Hayu Deswati**

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung BRSDM KP I Lt. 4, Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

Diterima tanggal: 22 Januari 2020; Diterima setelah perbaikan: 24 April 2020;

Disetujui terbit: 25 Juni 2020

ABSTRAK

Ikan mackerel merupakan salah satu komoditas impor utama pada sektor perikanan sehingga pengendalian impor terhadap komoditas ini dapat berperan mengurangi defisit neraca perdagangan. Peruntukkan impor mackerel sebagian besar untuk usaha pemindangan dan pasar domestik sebagai substitusi ikan lokal. Pengendalian impor terhadap ikan makarel sangat penting dilakukan karena merupakan pesaing ikan lokal dan berpotensi menurunkan permintaan terhadap ikan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pengendalian impor ikan mackerel khususnya pada usaha pemindangan. Data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan terkait usaha pemindangan yang dilaksanakan dari bulan Maret hingga September 2019 di DKI Jakarta dan Jawa Timur sebagai sentra pemasukan ikan mackerel impor. Analisis data menggunakan metode *analysis hierarchi process* (AHP) untuk merumuskan strategi pengendalian impor mackerel bagi usaha pemindangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang menjadi prioritas pertama adalah memperbaiki sistem logistik dan distribusi ikan lokal dengan bobot nilai sebesar 0,378. Prioritas kedua adalah peningkatan kapasitas armada penangkapan ikan dengan bobot nilai sebesar 0,233. Prioritas ketiga adalah peninjauan kembali mekanisme pemberian rekomendasi dan izin impor serta prosedur pengawasan impor mackerel dengan bobot nilai sebesar 0,215 dan prioritas keempat adalah edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat terkait ikan substitusi mackerel dan rantai dingin dengan bobot nilai sebesar 0,174. Pelaksanaan strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan bahan baku ikan lokal menjadi stabil dengan tingkat harga yang sesuai bagi pemindang sehingga alokasi impor mackerel yang dikeluarkan untuk usaha pemindangan dapat dikurangi secara bertahap.

Kata Kunci: usaha pemindangan; impor mackerel; strategi impor; bahan baku lokal; substitusi impor

ABSTRACT

Mackerel is one of the largest import commodities in the fisheries sector. Therefore, control over mackerel import helps reducing Indonesia's trade balance deficit. Mackerel were imported largely for fish brine industries and domestic market as a substitute for local fish. The import control especially significant since it is a local fish competitor and it possibly reduces the demand of local fish. Therefore, this study aims to formulate strategies for controlling mackerel imports for fish brine industries. This study used primary data that were collected through interviews and discussions among stakeholders of fish brine industries from March to September 2019 in DKI Jakarta and East Java as centers of imported mackerel fish. Data then were analysed using Analytical Hierarchy Process (AHP) to formulate import control strategies of mackerel for fish brine industries. The results suggested strategies with four priority scales. The priority was improving the logistic and distribution system of local fish with a value of 0,378. The second priority was increasing the capacity of the fishing fleet with a value of 0,233. The third priority was reviewing the mechanism of recommendations, import licenses and controlling procedures with a value of 0,215. The fourth priority was education to community regarding to mackerel substitution and cold chain system with a value of 0,174. Those strategies were expected to increase the availability of local fish raw materials with appropriate price level for the brine fish businessmen in order to gradually reduce the number of imported mackerel for the brine fish industry.

Keywords: brine fish industries; mackarel import, import strategy; local raw materials, import substitution

PENDAHULUAN

Impor merupakan keniscayaan yang wajar dilakukan berbagai negara di dunia dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dampak positif dari dilakukannya impor biasanya dirasakan suatu negara apabila impor digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan kegiatan produktif bagi perekonomian dan tidak menciptakan persaingan dan menjadi ancaman bagi pelaku usaha di dalam negeri (Atmadji, 2014). Kebijakan impor ikan di Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah no 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Pegaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. PP ini mengatur mekanisme pengendalian impor yang mengatur penetapan tempat pemasukan, jenis dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu dimana untuk impor mackerel yang digunakan dalam usaha pemindangan rekomendasi impor dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan izin impor dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. PP ini kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. Uraian tersebut di atas menjelaskan bahwa impor ikan mackerel untuk usaha pemindangan diperbolehkan asalkan memenuhi syarat yang diatur melalui PP 9 Tahun 2018 dan Permen KP 58 Tahun 2018.

Mackarel yang diimpor berkontribusi rata-rata 24,78% dari total volume impor perikanan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 2,79% per tahun dari tahun 2012 hingga 2018 (BPS, 2019). Peruntukan impor mackerel digunakan sebagai bahan baku pengolahan yang ditujukan untuk tiga jenis usaha yakni pemindangan (73,53%), industri pengalengan (8,97%) dan industri fillet (17,50%) dengan pasar tujuan 80,71% untuk pasar domestik dan 19,29% pasar ekspor. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peruntukan utama impor mackerel digunakan untuk usaha pemindangan dan dikonsumsi oleh pasar domestik. Pengendalian impor yang dilakukan terhadap barang untuk tujuan ekspor akan menyebabkan penurunan kinerja ekspor nasional yang tidak diharapkan dalam upaya pertumbuhan ekonomi Indonesia (Alhayat & Muslim, 2016). Oleh karena itu pengendalian impor yang dibahas dalam penelitian ini adalah pengendalian impor

dengan peruntukan sebagai bahan baku pemindangan

Faktor utama yang mendorong dilakukan impor mackerel oleh usaha pemindangan adalah adanya fluktuasi bahan baku ikan lokal karena musim penangkapan ikan yang relatif pendek mengakibatkan ketersediaan harga dan kuantitas bahan baku ikan lokal tidak kontinu. Hal ini mengakibatkan pelaku usaha pemindangan mensubstitusikan bahan baku ikan lokal dengan ikan mackerel yang diperoleh secara impor. Ikan mackerel hampir 70% didatangkan dari China (BPS, 2019). Industri perikanan China didukung oleh armada penangkap ikan yang terbesar di dunia. Data dari China Fisheries Yearbooks dalam Huangzhou (2015) menyebutkan bahwa pada tahun 2013 kapal ikan bermotor di China berjumlah 694.905 kapal dan tenaga kerja di sektor perikanan mencapai 14,43 juta orang. Selain didukung teknologi penangkapan, China ternyata juga merupakan negara pengolah perikanan yang terbesar yang didukung oleh 52 perusahaan pengolahan perikanan. Dukungan teknologi pengolahan dan penangkapan ikan tersebut di atas menyebabkan produksi ikan di China menjadi melimpah dan hal ini membuat ketersediaan dan harga ikan dari China lebih stabil sepanjang tahun. Selain itu hal ini juga diduga merupakan dampak adanya liberalisasi perdagangan RI-China tahun 2009 yang mengenakan nol tarif sehingga meningkatkan impor dari China (Sabarudin, 2014). Oleh karena itu, hal ini menjadi pendorong banyak dilakukan impor ikan mackerel dari China untuk kebutuhan usaha pemindangan.

Usaha pemindangan sebagian besar merupakan unit pengolahan skala mikro kecil sehingga umumnya tidak memenuhi syarat untuk memperoleh Angka Pengenal Importir Umum (API-U). Hal ini menyebabkan dalam memperoleh mackerel sebagai bahan baku pemindang membeli dari distributor atau importir mackerel. Pengimpor mackerel merupakan perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dan memperoleh rekomendasi impor dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kemudian mendapatkan izin impor dari Kementerian Perdagangan yang kemudian mendistribusikan mackerel kepada pemindang. Oleh karena itu pengimpor dari mackerel untuk usaha pemindangan pada umumnya berperan sebagai *trader* bukan pengguna langsung sehingga hal ini sering menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara pengajuan izin impor

dengan kebutuhan riil bahan baku mackerel untuk pemindangan.

Impor adalah salah satu bentuk terbukanya perekonomian suatu negara terhadap perdagangan internasional. Hampir semua negara melakukan perdagangan internasional yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tergantung dari banyaknya ekspor yang dilakukan suatu negara dibandingkan dengan impor yang dilakukan negara tersebut. Penelitian Indramadhini & Sitompul (2015) menyatakan bahwa kegiatan impor dapat mengakibatkan dua permasalahan yang pertama apabila impor lebih besar daripada ekspor yang mengakibatkan cadangan devisa berkurang dan yang kedua apabila sebagian besar barang-barang impor merupakan barang konsumsi yang mengakibatkan menurunnya produktifitas dalam negeri. Penelitian pentingnya pengendalian impor juga telah dilakukan oleh Siswanto, Sinaga, & Harianto (2018) pada komoditas beras untuk mengurangi ketergantungan beras impor dan juga menurut Varina (2018) tentang perlunya pengendalian impor untuk mengatasi tarif nol impor jagung yang mengakibatkan penurunan harga dan produksi jagung lokal. Sedangkan pada kegiatan impor ikan mackerel juga perlu dicermati agar tidak mengakibatkan permasalahan bagi ekonomi dalam negeri. Mackerel digunakan untuk usaha pemindangan bukan karena preferensi konsumen tetapi karena ikan lokal harga tinggi atau tidak tersedia. Hal ini berbeda jika dibandingkan impor tepung ikan yang memang produksi nasional masih belum mencukupi, ataupun impor salmon yang merupakan ikan yang tidak ada di Indonesia dan belum bisa digantikan ikan lokal. Oleh karena itu strategi dalam pengendalian impor mackerel harus dikaji lebih lanjut agar tidak mengganggu aktifitas produksi usaha pemindangan.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengendalian impor mackerel untuk usaha pemindangan dengan menggunakan metode Analisis Proses Hierarki yang melibatkan stakeholders di DKI Jakarta dan Jawa Timur sebagai pintu masuk utama impor mackerel. *Analitycal Hierarchy Process (AHP)* digunakan untuk memilih strategi prioritas dari alternatif strategi yang tersusun. Responden yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, yang ditentukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman responden dalam bidang yang diteliti, serta keterlibatannya dalam proses impor

mackerel. AHP biasa digunakan dalam penelitian kebijakan seperti yang dilakukan oleh Yanto (2017) dalam menganalisis upaya peningkatan kualitas objek wisata dan Hasan, Harianto, & Sarwanto (2019) yang meneliti Strategi Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Kabupaten Biak. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu merumuskan kebijakan pengendalian impor yang tepat sehingga dapat mengurangi besaran impor yang tidak perlu dan tidak sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha..

KARAKTERISTIK USAHA PEMINDANGAN

Ikan pindang merupakan salah satu produk olahan ikan tradisional sangat populer dan banyak disukai oleh masyarakat Indonesia khususnya di pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Pengolahan pindang merupakan kombinasi perebusan dan penggaraman dan sebagian besar merupakan industri skala mikro dan kecil dengan karakteristik pengolahan milik perorangan dan penjualan pindang dilakukan di pasar tradisional dan dijajakan keliling kampung. Penelitian Hanidah, Santoso, Mardawati, & Setiasih (2018) menunjukkan bahwa sebagian besar pemindang belum memahami pentingnya sanitasi selama proses pengolahan pindang cue dengan pengemasan yang sederhana sehingga umur simpan hanya berkisar antara 1-2 hari.

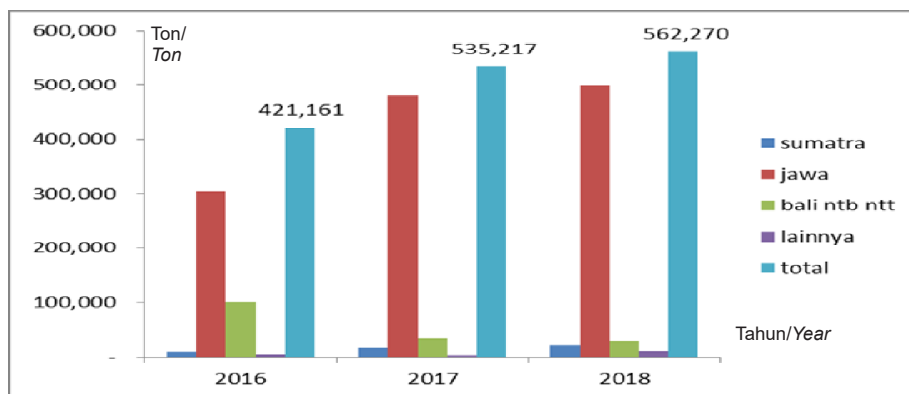
Keunggulan usaha pemindangan dibandingkan usaha pengolahan ikan lainnya adalah padat karya dan minim biaya pekerja, tidak perlu modal besar, biaya bahan baku relatif rendah, sedikit memerlukan bahan tambahan dan proses pembuatan sederhana. Citarasa ikan pindang yang khas serta harga terjangkau untuk berbagai lapisan masyarakat mengakibatkan permintaan ikan pindang cukup tinggi. Selain itu hasil analisis finansial yang dilakukan Damayanti (2016) menunjukkan bahwa usaha pemindangan merupakan usaha yang prospektif dengan R/C rasio sebesar 1,24 artinya layak untuk dijalankan dan dikembangkan. IRR yang dihasilkan adalah 5,11 artinya IRR > tingkat bunga relevan yaitu 5,11% > 4,14% sehingga investasi dikatakan menguntungkan. Rantai pemasaran ikan pindang di Kabupaten Pati menurut penelitian Damayanti (2015) terdiri dari dua jenis yaitu pemasaran secara langsung dan pemasaran melalui perantara yang dibagi lagi menjadi tiga jenis saluran pemasaran yakni saluran tiga tingkat, dua tingkat dan satu tingkat tergantung skala usaha dari produsen pemindang.

Jenis ikan yang digunakan sebagai bahan baku pindang di Indonesia bermacam-macam seperti ikan layang, kembung, cakalang, tongkol, tuna, ikan mas, ikan bandeng dan ikan nila serta ikan mackerel. Ikan mackerel dikenal dengan nama lokal ikan mackerel merupakan ikan impor dan tidak ada diperairan Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan responden permintaan ikan mackerel untuk usaha pemindangan sangat bergantung pada ketersediaan ikan lokal. Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Anom, Sribudhi & Saskara (2017) yang meneliti usaha pemindangan di Kabupaten Tabanan dan menyatakan bahwa nilai bahan baku merupakan faktor dominan yang mempengaruhi variasi dan variable input produksi sehingga bisa disimpulkan bahwa harga bahan baku merupakan pertimbangan utama pemindang dalam menentukan keputusan produksi. Proyeksi kebutuhan baku pindang per kluster berdasarkan data dari Ditjen PDSPKP (2018). Kebutuhan pemindang selalu meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 16% per tahun dan kebutuhan terbesar di daerah Jawa. Hampir 80 persen kebutuhan bahan baku pindang setiap tahunnya dialokasikan untuk pulau Jawa (Gambar 1). Hal ini disebabkan sebaran industri pengolahan pindang skala mikro kecil terpusat di Indonesia bagian barat khususnya pulau Jawa dengan Jumlah UPI mencapai 9.096 dari total 11.961 atau sekitar 79% dari total UPI. Sebaran produksi pindang tahun 2018 didominasi oleh 5 lokasi utama yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Bali dengan total produksi mencapai 61% dari total produksi pindang nasional (Ditjen PDSPKP, 2018). Oleh karena itu, hal ini menyebabkan tingginya permintaan impor ikan mackerel untuk daerah ini karena tingginya kebutuhan bahan baku untuk pemindangan. Hal tersebut diperkuat

dengan data dari BPS tahun 2016-2018 yang menunjukkan rata-rata volume impor mackerel berdasarkan tempat pemasukan menunjukkan sebesar 48.55% masuk dari pelabuhan Tanjung Priok dan 25.44% masuk dari Pelabuhan Tanjung Perak yang merupakan dua pelabuhan utama di Pulau Jawa.

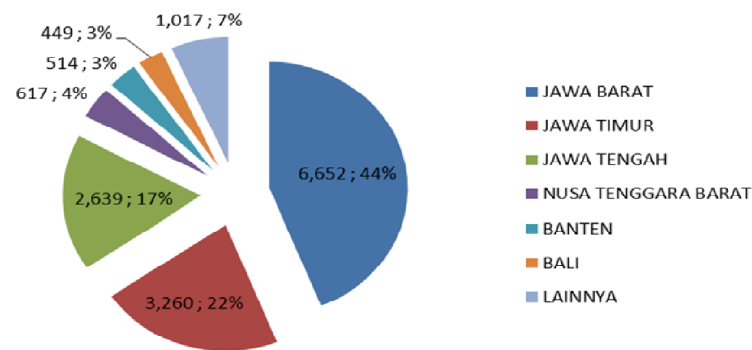
Usaha pemindangan sebagai kegiatan pengolahan ikan yang terus berkembang dan memiliki pangsa pasar yang cukup luas didukung dengan tingkat keuntungan yang cukup menjanjikan bagi pelaku usaha. Hasil wawancara dan pengumpulan data di lokasi penelitian menunjukkan bahwa nilai tambah usaha pemindangan untuk ikan bahan baku lokal berkisar antara Rp6.000-Rp30.000/kg dan ikan impor berkisar antara Rp3.000-Rp7.000/kg dengan kapasitas produksi untuk usaha pemindang skala besar dapat mencapai produksi 2-3 ton per hari. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha ini masih sangat menguntungkan dengan permintaan pasar yang terus meningkat. Secara empiris tingkat keuntungan usaha pemindangan juga dibuktikan oleh penelitian Firdaus (2014) di Kabupaten Bogor yang menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari usaha pemindangan adalah sebesar Rp1.687/kg bahan baku dengan tingkat keuntungan sebesar 58,16%.

Usaha pemindangan selain sebagai sebuah lapangan usaha yang menjanjikan prospek keuntungan yang baik juga berperan dalam menyerap tenaga kerja. Karakteristik usaha pemindangan yang padat karya menyebabkan usaha ini berdampak dalam mengurangi pengangguran. Data terakhir dari sensus ekonomi BPS tahun 2016 menyebutkan jumlah tenaga kerja di sektor pemindangan sebanyak 15.148 tenaga kerja dengan sebaran seperti pada Gambar 2.



Gambar 1. Tren Kebutuhan Bahan Baku Pindang (Ton/Tahun).
 Figure 1. Tren of Pindang Raw Material Needs (Ton/Year).

Sumber: Ditjen Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan, 2018/ Source: Direktorat General of Product Competitiveness, 2018



Gambar 2. Sebaran Jumlah Tenaga Kerja Pemandangan Berdasarkan Provinsi, 2016.
Figure 2. Distribution of Labour in Boiled Fish Industries by Province, 2016.

Sumber: Sensus Ekonomi BPS, 2016 diolah 2019/
 Source: Central Bureau of Statistics Republic of Indonesia Economy Sensus 2016 processed, 2019

Berdasarkan Gambar 2 maka diketahui bahwa usaha pemandangan berpusat di pulau Jawa dengan 44% tenaga kerjanya berada di Jawa Barat, 22% di Jawa Timur, dan 17% di Jawa Tengah. Jumlah tenaga kerja tersebut memang mengalami penurunan jika dibandingkan data Asosiasi Pengusaha Pindang Ikan Indonesia (APPIKANDO) pada tahun 2012 yang menyatakan jumlah pelaku industri pemandangan mencapai 65.766 pengusaha (kontan.co.id, 2012). Penurunan cukup signifikan ini diduga karena adanya kelangkaan bahan baku pada tahun 2016 yang membuat pelaku usaha pemandangan gulung tikar. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan bahan baku bagi usaha pemandangan perlu untuk diperhatikan dengan berbagai dukungan kebijakan sehingga tidak akan berdampak bagi pendapatan dan lapangan kerja rumah tangga pemandang.

PERAN MACKAREL SEBAGAI BAHAN BAKU USAHA PEMINDANGAN

Ikan mackerel merupakan ikan laut yang terdiri dari beberapa spesies dari *family Scombridae* yang banyak ditemukan di perairan Atlantik Utara,

Samudra Pasifik, Samudera India, Teluk Persia dan Teluk Aden. Data BPS, 2019 menyebutkan bahwa jenis mackerel yang banyak diimpor ke Indonesia sebagian besar adalah jenis *Scomber japonicus* dengan kandungan lemak yang tinggi dan warna daging yang kecoklatan dan banyak mengandung lemak (Adawwyah, 2008). Mackerel juga dikenal sebagai ikan salem dan banyak digunakan sebagai bahan baku usaha pemandangan terutama ikan pindang dalam keranjang yang banyak ditemui sebagai produk olahan ikan di Indonesia. Ukuran dan citarasa ikan mackerel dianggap sesuai untuk dapat diolah dan diterima masyarakat Indonesia sebagai bahan baku pindang seperti ditunjukkan pada Gambar 3.

Ikan mackerel digunakan sebagai substitusi ikan lokal untuk bahan baku pemandangan. Kualitas ikan mackerel dianggap lebih baik yang kemungkinan disebabkan proses rantai dingin oleh produsen di negara eksportir lebih terjaga. Hal ini memiliki pengaruh terhadap penurunan persentase ikan yang pecah perut saat diolah sebagai pindang sehingga sebagian pemandang memilih ikan mackerel untuk bahan baku produksinya.



Gambar 3. Ikan Mackarel sebagai Bahan Baku Pindang di Kabupaten Bogor.
Figur 3. Mackerel Fish as Raw Material for Boiled Fish in Bogor Regency.

Sumber: Data Primer, 2019/ Source: Primary Data, 2019

Tabel 1. Kontribusi Mackarel sebagai Bahan Baku Pindang.
Table 1. Contribution of Mackarels as Boiled Fish Raw Materials.

Keterangan/ Information	Tahun/ Year		
	2016	2017	2018
Kebutuhan bahan baku pindang (ton) /Boiled fish raw material needs (ton)	419,145	533,280	560,252
Total mackerel impor (ton) / Total imported mackerel (ton)	63,519	106,721	79,579
Impor mackerel untuk pemindangan (ton)/Mackrel imports for boiled fish raw material (ton)	46,705	78,477	58,514
Kontribusi mackerel untuk bahan baku pindang (%)/ Contribution mackerel as boiled fish raw materials (%)	11.14%	14.71%	10.44%

Sumber: Data BPS dan KKP diolah, 2019/ Source: BPS and KKP processed,2019

Berdasarkan data sekunder dan penelusuran peruntukan ikan mackerel maka kontribusi ikan mackerel sebagai bahan baku pindang ditampilkan dalam Tabel 1.

Kontribusi ikan mackerel untuk usaha pemindangan secara nasional berkisar antara 10%-14% (Tabel 1). Akan tetapi kondisi ini tentunya berbeda apabila dilihat berdasarkan lokasi pemindangan karena karakteristik lokasi menentukan tingkat kebutuhan terhadap ikan mackerel. Data dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor menyebutkan skema yang berbeda dalam penggunaan mackerel sebagai bahan baku pindang . Proporsi penggunaan bahan baku ikan mackerel di Kabupaten Bogor sangat berfluktuasi bergantung pada ketersediaan ikan lokal dengan kisaran 10% hingga 80% pada rentang waktu tahun 2014 sampai 2019 yang dijelaskan melalui Tabel 2.

Kebutuhan ikan mackerel untuk usaha pemindangan di Kabupaten Bogor mengalami

fluktuasi dimana penggunaan tertinggi pada tahun 2016 yakni sebanyak 80% dari total produksi (Tabel 2). Hasil pengumpulan data mengemukakan bahwa hal ini disebabkan langkanya bahan baku ikan lokal di wilayah Kabupaten Bogor yang kemungkinan disebabkan adanya berbagai kebijakan pemerintah seperti moratorium kapal yang menyebabkan distribusi ikan untuk bahan baku di Kabupaten Bogor mengalami penurunan drastis. Hal ini menyebabkan produsen pindang beralih ke ikan mackerel. Akan tetapi hingga semester 1 tahun 2019 berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha distribusi ikan lokal ke Kabupaten Bogor untuk bahan baku pindang mulai membaik yang semakin menurunkan penggunaan mackerel seperti ditunjukkan Tabel 2. Kondisi ini juga dibenarkan oleh supplier ikan di daerah Kabupaten Bogor yang lebih menyukai mendistribusikan ikan lokal apabila ketersediaan dan harganya terjangkau bagi pemindang. Hal berbeda dipaparkan oleh pemindang di Kabupaten Lamongan yang menyampaikan bahwa persentase

Tabel 2. Produksi dan Penggunaan Bahan Baku Mackarel dalam Usaha Pemindangan di Kabupaten Bogor, Tahun 2014-2019.

Table 2. Production and Use of Mackarel As Raw Material in Boiled Fish Industries at Bogor Regency, Year 2014-2019.

Tahun/Year	Total Produksi/ Total Production (Ton)	Persentase Penggunaan Bahan Baku Ikan Lokal/ Percentage of Local Raw Materials	Persentase Penggunaan Bahan Baku Ikan Mackarel/ Percentage of Mackarel as Raw Materials
2014	10,344.44	90%	10%
2015	8,058.30	80%	20%
2016	8,617.00	20%	80%
2017	9,684.35	50%	50%
2018	6,050.58	60%	40%
2019	6,345.64	75%	25%

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor (2019)/Source: Bogor Regency Fisheries and Animal Husbandry Departement (2019)

ikan mackerel yang digunakan untuk bahan baku adalah sebesar 40% dan relatif stagnan meskipun kondisi ikan lokal sedang melimpah. Oleh karena itu penggunaan ikan mackerel untuk kebutuhan bahan baku ikan pindang sangat bergantung pada lokasi usaha pemindangan yang dapat disebabkan perbedaan preferensi penggunaan bahan baku dari pelaku usaha pemindangan.

Pelaku usaha pemindangan memperoleh mackerel impor dari distributor yang memiliki angka pengenal importir dan telah mengurus izin impor. Hal ini menyebabkan terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan kebutuhan produksi dengan impor yang dilakukan. Data dari Direktorat Logistik Ditjen PDSPKP KKP pada semester 1 tahun 2019 hanya terdapat 123 importir yang mendapatkan rekomendasi impor mackerel untuk usaha pemindangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah importir sangat jauh dibandingkan jumlah usaha pemindangan di seluruh Indonesia yang menurut data APPIKANDO mencapai 65.566 pelaku usaha. Artinya jika dibandingkan 1 perusahaan importir dapat melayani kebutuhan lebih dari 500 usaha pemindangan sehingga hal ini menyebabkan sering terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan mackerel di level pelaku usaha pemindangan dengan realisasi impor. Ketidaksesuaian ini juga dapat diakibatkan berbagai faktor seperti kendala teknis dalam pengiriman dan pengurusan izin impor sehingga beberapa importir yang sudah terlanjur melakukan pengurusan izin impor melakukan impor meskipun dari sisi kebutuhan pemindang belum dianggap perlu bahan baku impor. Sebaliknya karena pengurusan izin impor yang bertahap dan melibatkan beberapa instansi menyebabkan impor tidak dapat diurus secara cepat saat bahan baku ikan lokal tidak tersedia sehingga saat tertentu dapat terjadi kelangkaan bahan baku ikan untuk usaha pemindangan.

STRATEGI PENGENDALIAN IMPOR MACKAREL UNTUK BAHAN BAKU USAHA PEMINDANGAN

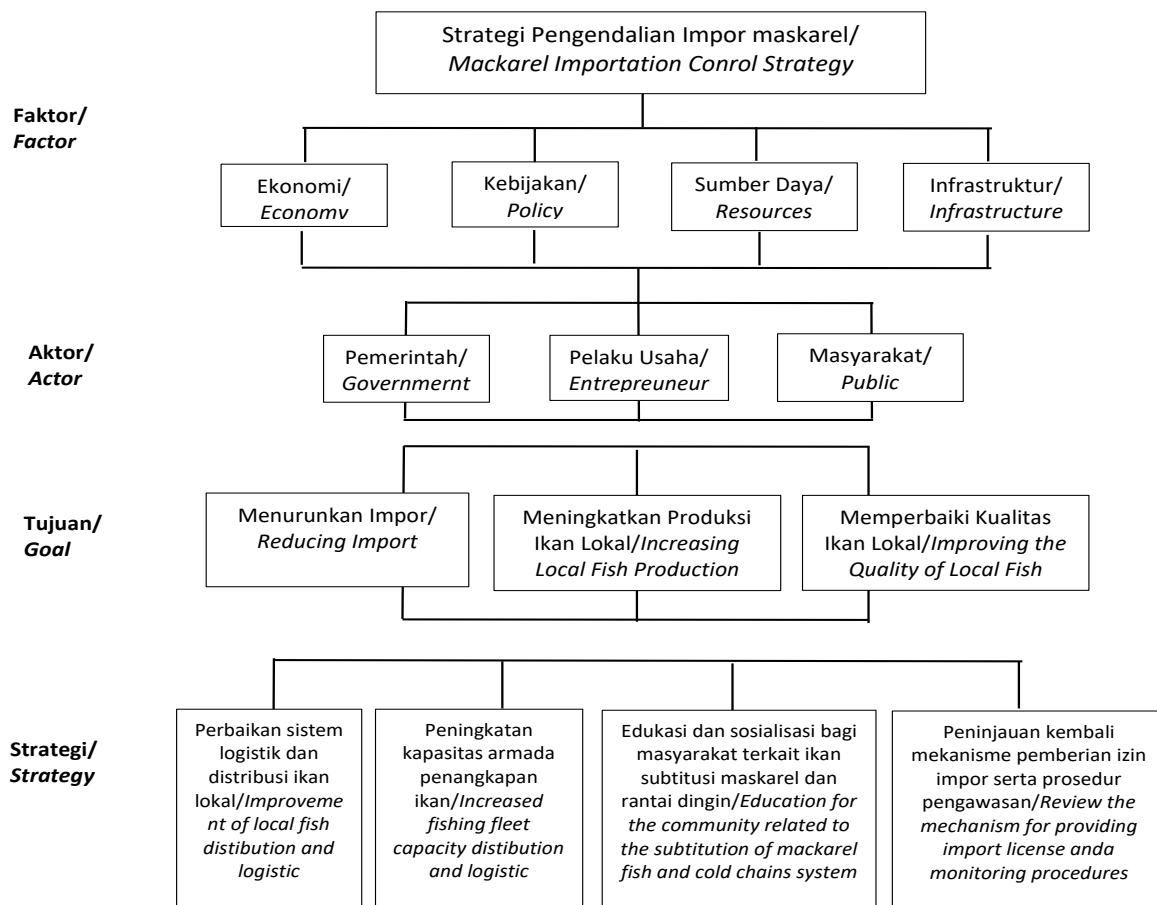
Pengendalian impor komoditas perikanan perlu untuk dilakukan dalam upaya melindungi produk dalam negeri dalam meningkatkan kinerja sektor perdagangan, akan tetapi pengendalian impor yang dilakukan pemerintah harus secara tepat sesuai dengan kondisi di sektor perikanan karena disisi lain impor juga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat terutama sebagai bahan baku produksi. Faktor harga merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi

penggunaan mackerel sebagai bahan baku ikan pindang karena harga mackerel yang lebih stabil dan dapat bersaing dengan ikan layang mengakibatkan masih memungkinkan sebagai bahan baku pengganti. Hal ini dapat disebabkan juga karena liberalisasi perdagangan RI-China yang mengakibatkan tarif impor menjadi nol sehingga berpotensi harga mackerel lebih rendah dan kompetitif dibandingkan bahan baku lokal pemindangan. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pengendalian impor untuk komoditas mackerel yang diperuntukkan bagi usaha pemindangan karena usaha ini berpotensi untuk dapat dipenuhi dari bahan baku ikan lokal. Berikut struktur hierarki strategi pengendalian impor ikan mackerel yang dilakukan oleh penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.

Struktur hierarki dalam analisis yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari lima level hierarki yaitu level 1 fokus, level 2 faktor, level 3 aktor, level 4 tujuan dan level 5 strategi. Hierarki strategi pengendalian impor mackerel disajikan dalam Gambar 4. Model AHP menggunakan persepsi manusia yang dianggap pakar atau ahli sebagai input utamanya dimana pada kegiatan penelitian ini mengacu pada penelitian Faletan (2016) yakni orang yang memahami permasalahan yang diajukan dan merasakan akibat suatu masalah atau memiliki kepentingan terhadap masalah tersebut. Perbandingan berpasangan dilakukan dalam setiap level hierarki untuk menentukan prioritas yang dimulai pada puncak hierarki hingga level dibawahnya. Tujuan akhir dari perumusan strategi menggunakan analisis AHP adalah pemilihan prioritas strategi dalam pengendalian impor mackerel. Alternatif strategi pada level 5 yaitu : (1) perbaikan sistem logistik dan distribusi ikan, (2) peningkatan kapasitas armada penangkapan ikan, (3) edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat terkait ikan substitusi mackerel dan rantai dingin, dan (4) peninjauan kembali mekanisme pemberian izin impor dan prosedur pengawasan.

Tingkat Peranan Faktor dalam Pengendalian Impor Mackarel

Untuk mencapai tujuan utama dalam mengendalikan impor mackerel beberapa faktor yang berhubungan dengan pengendalian impor mackerel yang terdiri dari empat faktor yakni ekonomi, kebijakan, sumber daya dan infrastruktur. Dari masing-masing sub sektor tersebut memiliki nilai bobot yang berbeda seperti yang terlihat pada Tabel 3.



Gambar 4. Struktur Hierarki Strategi Pengendalian Impor Ikan Mackarel.
 Figure 4. Hierarchical Structure of Mackarel Fish Import Control Strategy.

Tabel 3. Pengolahan Bobot Nilai Faktor dalam Pengendalian Impor Mackarel.
 Tabel 3. Processing Value Weights of Factor in Mackarel Import Control.

No	Faktor/Factor	Bobot Nilai/Value Weights	Prioritas/Priority
1	Ekonomi/ Economy	0.257	2
2	Kebijakan/ Policy	0.147	3
3	Sumber daya/ Resources	0.483	1
4	Infrastruktur/ Infrastructure	0.113	4

Rasio Inkonsistensi (RI)/ Inconsistency Ratio (IR) = 0.08

Sumber : Data primer diolah, 2019/ Source: Primary data processed, 2019

Pada Tabel 3 di atas terlihat bahwa semua faktor memiliki bobot nilai masing-masing yang menandakan prioritas dari masing-masing aspek tersebut. Faktor sumber daya (0,483) menjadi prioritas pertama yang harus segera dicarikan solusinya. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu alasan utama pelaku usaha mengimpor ikan mackerel karena ketersediaan bahan baku ikan lokal yang tidak kontinu dan sangat tergantung musim yang mengakibatkan fluktuasi harga ikan lokal. Menurut Mankiw (2013) banyak faktor

yang mempengaruhi impor diantaranya adalah harga barang dalam negeri dan luar negeri dan nilai tukar mata uang asing. Hal lain yang lebih mempengaruhi impor mackerel adalah karena harga barang dalam negeri yang lebih tinggi dan juga ketersediaannya yang tidak kontinu. Prioritas kedua yaitu aspek ekonomi yang tidak kalah penting harus ditindaklanjuti oleh pemerintah terutama yang terkait dengan cara-cara untuk menurunkan atau mengurangi impor ikan mackerel.

Tingkat Peranan Aktor dalam Pengendalian Impor Mackarel

Pengolahan pada level aktor menunjukkan tingkat pengaruh aktor terhadap faktor. Perhitungan level aktor dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 4 dari aspek ekonomi, kebijakan dan infrastruktur terlihat bahwa pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab untuk mengambil tindakan. Pada aspek ekonomi (0,594) pemerintah punya wewenang untuk melakukan suatu kegiatan untuk mengurangi jumlah impor ikan mackarel salah satunya seperti penetapan alokasi impor. Pada aspek kebijakan (0,661) bobot nilai pemerintah cukup jauh dengan kedua aktor lainnya karena hal ini memang merupakan wewenang mutlak dari pemerintah. Begitu pula yang terlihat pada aspek infrastruktur karena untuk penyediaan infrastruktur yang lengkap menjadi tugas dari pemerintah.

Sementara itu untuk aspek sumber daya dari ketiga aktor yang dinilai tidak ada yang memiliki bobot nilai lebih besar. Hal tersebut karena faktor-faktor yang termasuk dalam sumber daya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Namun dari distribusi nilai justru nilai pemerintah paling kecil diantara kedua aktor lainnya yang artinya justru peran aktif masyarakat dan pelaku usaha terkait lebih diutamakan fungsinya.

Tingkat Peranan Tujuan dalam Pengendalian Impor Mackarel

Pengolahan pada level tujuan untuk menunjukkan tingkat pengaruh faktor dan aktor terhadap tujuan dari penelitian impor ikan mackarel ini. Perhitungan level tujuan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 4. Pengolahan Bobot Nilai Aktor dalam Pengendalian Impor Mackarel.
Tabel 4. Processing Value Weights of Actor in Mackarel Import Control.

Aktor/ Actor	Faktor/ Factor			
	Ekonomi/ Economy	Kebijakan/ Policy	Sumber Daya/ Resource	Infrastruktur/ Infrastructure
Pemerintah/Government	0.594	0.661	0.200	0.594
Pelaku Usaha/Entrepreneur	0.249	0.208	0.400	0.249
Masyarakat/Public	0.157	0.131	0.400	0.157

Sumber : Data primer diolah, 2019/ Source: Primary data processed, 2019

Tabel 5. Pengolahan Bobot Nilai Tingkat Tujuan dalam Pengendalian Impor Mackarel.
Tabel 5. Processing Value Weights of Goal Level in Mackarel Import Control.

Aktor/ Actor	Tujuan/ Goal		
	Menurunkan Impor/ Reducing Imports	Meningkatkan Produksi Dalam Negeri/ Increasing Domestic Product	Memperbaiki Kualitas Ikan Lokal/ Improving the Quality of Local Fish
Ekonomi/Economy			
Pemerintah/Government	0,594	0,249	0,157
Pelaku Usaha/Entrepreneur	0,140	0,528	0,333
Masyarakat/Public	0,169	0,443	0,387
Kebijakan/Policy			
Pemerintah/Government	0,550	0,210	0,240
Pelaku Usaha/Entrepreneur	0,143	0,429	0,429
Masyarakat/Public	0,140	0,333	0,528
Sumber Daya/Resources			
Pemerintah/Government	0,200	0,210	0,240
Pelaku Usaha/Entrepreneur	0,135	0,584	0,281
Masyarakat/Public	0,135	0,584	0,281
Infrastruktur/Infrastructure			
Pemerintah/Government	0,500	0,250	0,250
Pelaku Usaha/Entrepreneur	0,135	0,584	0,281
Masyarakat/Public	0,163	0,540	0,297

Sumber : Data primer diolah, 2019/ Source: Primary data processed, 2019

Berdasarkan angka yang terlihat pada Tabel 5 menunjukkan masing-masing aktor memiliki prioritas dan kepentingan yang berbeda-beda. Namun secara keseluruhan dapat terlihat bahwa Pemerintah merupakan aktor utama dalam aktivitas impor ikan mackarel dan penetapan strategi untuk mengendalikan impor yang cukup tinggi tersebut. Untuk tujuan pertama yaitu menurunkan impor tentunya ini menjadi wewenang utama dari pemerintah yang harus segera ditemukan tindakan teknisnya. Sementara itu untuk tujuan kedua yaitu meningkatkan produksi ikan lokal terlihat pelaku usaha menjadi aktor utama yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan ini. Serta tujuan ketiga yaitu memperbaiki kualitas dan kuantitas ikan layang sebagai bahan baku pindang menjadi tanggung jawab masyarakat secara umum.

Tingkat Peranan Strategi dalam Pengendalian Impor Mackarel

Pengolahan pada level strategi menunjukkan tingkat pengaruh strategi terhadap tujuan utama. Hasil dari pengolahan level strategi dapat dilihat pada Tabel 6.

Pada Tabel 6 dari berbagai aspek hampir semua responden menjawab untuk perbaikan sistem logistik dan distribusi ikan lokal. Berdasarkan hasil wawancara salah satu alasan pemindang memutuskan untuk mengimpor ikan mackarel karena kelangkaan ikan layang sebagai bahan baku utama usaha mereka yang akhirnya belakangan justru ikan-ikan mackarel tersebut semakin banyak diminati. Sehingga

kondisinya saat ini meskipun pasokan ikan lokal yang menjadi bahan baku pindang sudah tersedia namun segmentasi pasar ikan mackarel pindang sudah terlanjur terbentuk. Oleh karena itu dengan adanya sistem distribusi ikan lokal yang lebih baik diharapkan bisa menyediakan bahan baku pindang setiap hari dengan tingkat harga yang dapat diterima oleh pemindang. Penentuan strategi yang menjadi prioritas dalam pengendalian impor mackerel disajikan melalui Tabel 7.

Tabel 7 menunjukkan pemilihan alternatif strategi oleh para responden terpilih, sebagai prioritas pertama yaitu perbaikan sistem logistik dan distribusi ikan lokal karena yang menjadi faktor pendorong utama impor adalah fluktuasi bahan baku ikan lokal. Prioritas kedua yaitu peningkatan kapasitas armada penangkapan ikan, hal ini dimaksudkan untuk menambah jumlah ikan yang diproduksi sehingga akan meningkatkan ketersediaan ikan lokal. Prioritas selanjutnya adalah dengan peninjauan kembali mekanisme pemberian rekomendasi dan izin impor. Hal ini diperlukan untuk memperjelas kewenangan penerbitan izin hingga ke pengawasan peruntukan impor mackerel sesuai dengan yang direncanakan. Strategi selanjutnya dalam pengendalian impor mackerel adalah edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat terhadap nilai gizi ikan lokal yang tidak kalah dari ikan mackerel, serta edukasi bagi pelaku usaha pemindangan dan juga bagi nelayan penangkap ikan untuk memperbaiki metode handling dan pelaku pemasaran untuk menjaga rantai dingin sehingga ikan lebih berkualitas.

Tabel 6. Pengolahan Bobot Nilai Tingkat Strategi dalam Pengendalian Impor Mackarel. Tabel 6. Processing Value Weights of Strategic Level in Mackarel Import Control.

No	Faktor/Factor	Alternatif Kebijakan/ Policy Alternative			
		Alternatif 1/ Alternative 1	Alternatif 2/ Alternative 2	Alternatif 3/ Alternative 3	Alternatif 4/ Alternative 4
1	Ekonomi/ Economy	0.418	0.227	0.167	0.188
2	Kebijakan/Policy	0.416	0.183	0.196	0.204
3	Sumber Daya/Resources	0.339	0.265	0.170	0.225
4	Infrastruktur/Infrastructure	0.411	0.170	0.172	0.246

Sumber : Data primer diolah, 2019/ Source: Primary data processed, 2019

Keterangan/Remarks :

- Alternatif 1 : Perbaikan sistem logistik dan distribusi ikan lokal / *Improvement of local fish distribution and logistic*
- Alternatif 2 : Peningkatan kapasitas armada penangkapan ikan/ *increased fishing fleet capacity*
- Alternatif 3 : Edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat terkait ikan substitusi mackerel dan rantai dingin untuk pelaku usaha dan pelaku pemasaran ikan/ *Education for the community is related to the substitution of mackerel fish and cold chains system*
- Alternatif 4 : Peninjauan kembali mekanisme pemberian rekomendasi dan izin impor serta prosedur pengawasan/ *Review the mechanism for providing import licenses and monitoring procedures*

Tabel 7. Bobot dan Prioritas Alternatif Strategi dalam Pengendalian Impor Mackarel.
Table 7. Weight and Priority of Alternative Strategy in Mackarel Import Control.

No	Alternatif Strategi/ Alternative Strategy	Bobot Nilai/ Weight Value	Prioritas/ Priority
1	Perbaikan sistem logistik dan distribusi ikan lokal/ <i>Improvement of local fish distribution and logistic</i>	0.378	1
2	Peningkatan kapasitas armada penangkapan ikan/ <i>Increased fishing fleet capacity</i>	0.233	2
3	Edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat terkait ikan substitusi mackerel dan rantai dingin untuk pelaku usaha dan pelaku pemasaran ikan / <i>Education for the community is related to the substitution of mackerel fish and cold chains system</i>	0.174	4
4	Peninjauan kembali mekanisme pemberian rekomendasi dan izin impor serta prosedur pengawasan/ <i>Review the mechanism for providing recommendations and import licenses and monitoring procedures</i>	0.215	3

Rasio Inkonsistensi (RI)/ Inconsistency Ratio (IR) = 0.03

Sumber : Data primer diolah, 2019/ *Source: Primary data processed, 2019*

Hasil analisis data realisasi impor dari BKIPM pada semester 1 tahun 2019 memperlihatkan bahwa peruntukan impor mackerel utamanya untuk Industri pemindangan yakni sebesar 73,53% dan diperuntukan untuk pasar konsumen lokal sebesar 80,71%. Pada dasarnya mackerel untuk usaha pemindangan dapat disubstitusikan oleh bahan baku ikan lokal asalkan ketersediaan bahan baku ikan lokal merata sepanjang tahun di sentra-sentra produksi pemindangan. Ikan mackerel berkontribusi sekitar 10-14% dari total bahan baku pemindangan yang digunakan secara nasional sehingga jika ingin mengurangi impor harus mengupayakan ketersediaan bahan baku ikan yang tersedia sepanjang tahun dan bisa terjangkau oleh pemindang untuk menggantikan peran dari mackerel.

Faktor pendorong utama dilakukannya impor mackerel adalah fluktuasi bahan baku ikan lokal yang disebabkan karena faktor musim dan juga minimnya jumlah armada penangkapan ikan skala besar yang dapat beroperasi sepanjang tahun di Indonesia yang mempengaruhi kontinuitas pasokan di pasar. Oleh karena itu alternatif strategi yang dihasilkan dari hasil analisis dalam penelitian ini adalah perbaikan sistem distribusi dan logistik ikan lokal. Perbaikan ini dapat dilakukan diawali dengan integrasi informasi dari berbagai *stakeholders* sebaran produksi ikan lokal bahan baku pindang sehingga dapat menghasilkan peta harga dan produksi ikan lokal serta proyeksi produksi ikan lokal. Selain itu juga perlu untuk membangun teknologi informasi berupa platform yang secara *real time* dapat mengintegrasikan penjual dan

pembeli ikan lokal sehingga informasi pasar tentang permintaan dan penawaran ikan lokal dapat diakses dengan mudah yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi pemasaran. Dampak dari penerapan sistem informasi pemasaran berpengaruh secara signifikan terhadap keunggulan bersaing yang seharusnya didukung oleh tiga faktor yakni data internal, pengetahuan pemasaran dan riset pemasaran (Bahy, Riyadi, & Rahman, 2016).

Perbaikan sistem logistik juga dapat dilakukan dengan menginisiasi kerjasama antara operator sistem logistik ikan nasional dengan jasa pengangkutan sehingga dapat menekan biaya transportasi ikan. Selain itu operator sistem logistik ikan nasional diharapkan dapat mengakses informasi produksi dan kebutuhan pelaku usaha sehingga melakukan perencanaan yang tepat dalam mengatur stok dan distribusi ikan lokal dan ikan impor. Penelitian Wilujeng (2016) menyebutkan bahwa importir mempertimbangkan jadwal pengiriman sebagai faktor utama dalam menentukan keputusan impor dan penggunaan moda transportasi sehingga hal ini harus dipertimbangkan dalam memperbaiki kinerja logistik dan transportasi dalam negeri terutama antara daerah sentra produksi dengan pengguna bahan baku ikan.

Selain itu strategi berikutnya yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas armada penangkapan ikan nasional, selama ini kapal penangkapan ikan di Indonesia didominasi oleh kapal skala kecil yang jauh teknologinya jika dibandingkan dengan China selaku importir utama mackerel ke Indonesia. China memiliki

armada kapal lebih dari 600.000 armada dan tenaga kerja hingga 14,43 juta orang sehingga produksi perikanan tangkap China menjadi yang terbesar di dunia. Hal tersebut juga didukung oleh fasilitas *cold storage* yang sudah terintegrasi dalam kapasitas yang sangat besar untuk menjaga ketersediaan pasokan sepanjang tahun dan menjaga stabilitas harga. Peningkatan kapasitas armada juga diperlukan dalam bentuk skala kapal yang lebih besar dan canggih dengan jangkauan luas sehingga bisa beroperasi sepanjang tahun untuk meningkatkan pasokan, diharapkan kapal tersebut juga memiliki fasilitas pengolahan pembekuan sehingga ikan yang ditangkap dapat dibekukan di dalam kapal untuk meningkatkan kualitas ikan yang tertangkap. Strategi peningkatan produksi memang mutlak diperlukan dalam mengurangi ketergantungan impor, hal ini juga dilakukan dalam pengendalian impor kedelai di Indonesia sesuai dengan hasil penelitian Suyastri (2008) karena ketergantungan impor dalam jangka panjang akan berdampak negatif dan dapat menguras devisa negara serta ketahanan pangan nasional.

Prioritas strategi berikutnya adalah dengan peninjauan kembali mekanisme pemberian rekomendasi, izin dan pengawasan impor. Pemberian izin impor komoditas perikanan melibatkan berbagai stakeholders di bawah koordinasi kementerian koordinator perekonomian. Berdasarkan PP No 9 Tahun 2018 izin impor dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dengan rekomendasi impor dari KKP untuk non bahan baku industri dan dari Kementerian Perindustrian untuk bahan baku industri, Terkait dengan rekomendasi impor mackerel sebagai bahan baku pemindangan diatur melalui Permen KP no 58 Tahun 2019, dimana penentuan jenis, volume dan waktu pemasukan didasarkan pada kebutuhan dan ketersediaan pasokan atau produksi ikan, musim tangkap, tingkat konsumsi ikan dan lokasi tujuan distribusi. Akan tetapi dalam peraturan tersebut belum diatur lebih detail apa saja yang menjadi indikator kebutuhan dan ketersediaan pasokan atau produksi ikan domestik yang dapat menjadi penentu besarnya rekomendasi impor yang diberikan. Besaran rekomendasi yang diberikan melihat historis dari pelaporan pengajuan impor sebelumnya yang belum dapat semuanya terverifikasi di lapangan karena keterbatasan sumberdaya yang dimiliki seharusnya indikator serapan impor bukan satu-satunya indikator

penting yang digunakan untuk menentukan rekomendasi impor berikutnya.

Mekanisme pengawasan disebutkan dalam Permen KP 58 Tahun 2018 pasal 20 yang menyebutkan bahwa kewenangan pengawasan peruntukan bahan baku dan bahan penolong industri ada pada pengawas perikanan tapi tidak dijelaskan lebih lanjut bentuk koordinasi dan mekanismenya belum diatur lebih lanjut dalam standar operasional prosedur yang lebih rinci. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dan komunikasi dari *stakeholders* pemberi rekomendasi dan pengawas distribusi yang mengakibatkan kurang optimalnya pengawasan. Jumlah SDM pengawas perikanan hanya sebesar 270 orang di seluruh Indonesia (<https://kkp.go.id/djpsdkp/page/1687-jumlah-pegawai-ditjen-psdkp>), jumlah ini dianggap tidak sebanding untuk melakukan pengawasan distribusi perikanan baik ekspor, impor, maupun domestik. Data jumlah eksportir yang tercatat di BKIPM pada tahun 2017 sebanyak 2759 pelaku usaha, jumlah importir sebanyak 752 pelaku usaha (BKIPM, 2019). Hal tersebut diatas menggambarkan bahwa jumlah pengawas perikanan saat ini masih belum mencukupi untuk melakukan pengawasan distribusi secara optimal sehingga hanya sebagian kecil unit usaha yang mampu untuk dicover dalam area pengawasan distribusi termasuk didalamnya termasuk distribusi impor hasil perikanan.

Alternatif strategi berikutnya dalam skema pengendalian impor mackerel adalah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat terkait ikan substitusi mackerel dan rantai dingin untuk pelaku usaha dan pelaku pemasaran ikan. Substitusi impor dapat dilakukan melalui beberapa strategi seperti yang dilakukan oleh Russia melalui pengembangan program-program yang ditargetkan ditingkat pusat, daerah hingga level perusahaan untuk meningkatkan efisiensi substitusi impor (Belobragin, Burak, Zvorykina, Rostanets, & Magomedov, 2016). Hal ini seharusnya juga dapat dilakukan dalam mendukung substitusi impor mackerel di Indonesia dimana disusun strategi baik ditingkat pusat, daerah hingga level pelaku usaha yang disebabkan beberapa daerah tertentu pengguna mackerel memiliki preferensi yang khusus terhadap ikan mackerel. Penggunaan mackerel di Lamongan berdasarkan wawancara dengan pemindang skala besar menyebutkan bahwa penggunaan bahan baku mackerel mencapai 40% dari total produksi setiap harinya tanpa mempertimbangkan ketersediaan dan harga

ikan lokal. Hal ini disebabkan menurut pemahaman pelaku usaha mackerel sudah memiliki pangsa pasar tersendiri di konsumen serta kualitasnya yang lebih bagus tidak muda pecah perut, oleh karena itu perlu dilakukan edukasi terhadap konsumen untuk lebih prioritas memilih ikan lokal dengan kandungan gizi yang tidak kalah dari mackerel. Selain itu proses edukasi juga perlu dilakukan untuk nelayan karena kualitas ikan sangat tergantung dari proses penangkapan ikan di atas kapal dan penanganan rantai dingin sepanjang rantai pemasaran. Proses penangkapan ikan yang bagus akan membuat ikan berkualitas sehingga saat diproses untuk diolah tekstur menjadi lebih segar dan tidak mudah pecah perut. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Petrov (2015) yang menyatakan bahwa langkah perlindungan terhadap barang impor dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk daging di Rusia yang akan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Pengendalian impor produk perikanan yang dilakukan oleh pemerintah membutuhkan strategi yang tepat sehingga tidak memberikan dampak negatif bagi pelaku usaha pemindangan. Prioritas kebijakan terpilih diharapkan dapat membuka informasi pasar sehingga terjadi efisiensi pemasaran. Adanya informasi pasar dan kontinuitas pasokan menyebabkan tingkat harga ikan lokal menjadi lebih bersaing sehingga ikan impor tidak akan laku di pasar karena harganya lebih mahal daripada ikan lokal. Perbaikan pengawasan dan juga prosedur dalam penetapan rekomendasi kuota impor diharapkan akan menurunkan angka impor mackerel dengan alokasi impor yang lebih relevan dengan kebutuhan pemindang dan kondisi produksi dalam negeri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Rismutia Hayu Deswati sebagai kontributor anggota yang banyak memberikan bimbingan selama penulisan. Selain itu kami ucapkan kepada Direktorat Logistik, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu serta Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang banyak membantu terkait dengan pengadaan data bagi penelitian ini dan khususnya kepada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian untuk menghasilkan karya tulis ilmiah ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Kontributor dalam karya tulis ilmiah adalah Freshty Yulia Arthatiani sebagai kontributor utama dan Rismutia Hayu Deswati sebagai kontributor anggota yang sudah disepakati bersama-sama untuk diketahui semua pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawwyah R. (2008). *Pengolahan dan Pengawetan Ikan*. Jakarta (ID): Bumi Aksara.
- Alhayat, A. P & Muslim, A. (2016). *Proyeksi Ekspor dan Impor Indonesia: Suatu Pendekatan Vector Autoregressive*. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan. Vol 10 (1): 87-102.
- Anom, D., G., Sribudhi, M. K & Saskara, I.A.N. (2017). *Penentu Kesejahteraan Pengusaha "Pemindangan" di Kabupaten Tabanan*. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan. Vol 10(2): 85-94. doi: <https://doi.org/10.24843/JEKT.2017.v10.i01.p09>.
- Atmadji E. (2004). *Analisis Impor Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 9 (1); 33-46.
- Bahy, H. A., J. A. Riyadi, & Rahman, S. (2016). *Pengaruh Sistem Informasi Pemasaran terhadap Keunggulan Bersaing: Studi pada UKM Bunga Hias Kota Batu*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol 37(2): 154-162.
- Belobragin, V.Y, Burak, P.O., Zvorykina, T.I., Rostanets, V.G., and Magomedov, S.M. (2016). *Topical Issues of The Theory and Practice of Import Substitution in the Russian Federation*. International Journal of Economics and Financial Issues. Vol 6(2):14-23.
- BPS. Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Ekspor Impor Tahun 2012-2019*. Jakarta.
- Damayanti, H. E., (2015). *Rantai Pemasaran Ikan Pindang di Kabupaten Pati*. Jurnal Litbang. Vol XI (1):23-30.
- Damayanti, H. E., (2016). *Kelayakan Usaha Industri Ikan Pindang Skala Rumah Tangga di Kabupaten Pati*. Jurnal Litbang. Vol XII (1):22-31.
- Ditjen PSDKP. *Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan*. 2019. Sumberdaya Manusia. Retrieved From: <https://kkp.go.id/djpsdkp/page/1687-jumlah-pegawai-ditjen-psdkp>.
- Direktorat PBM. Ditjen PDSPKP. *Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan*. (2019). [Bahan Paparan FGD Kebutuhan Ikan Mackarel untuk Pengolahan Perikanan, Jakarta 1 Agustus 2019] Overview Industri Pindang Ikan di Indonesia.

- Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor. (2019). [Bahan Paparan FGD Kebutuhan Ikan Mackarel untuk Pengolahan Perikanan, Jakarta 1 Agustus 2019] Kebutuhan Mackarel untuk Pengolahan Perikanan.
- Falatehan A. F. (2016). *Analytical Hierarchy Process (AHP): Teknik Pengambilan Keputusan untuk Pembangunan Daerah*. Yogyakarta (ID): Indomedia Pustaka.
- Firdaus N. (2014). *Analisis Nilai Tambah Usaha Pemindangan Ikan (Studi Kasus di UD Cindy Group, Kabupaten Bogor)*. [Skripsi]. Departemen Agribisnis. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor.
- Hanidah, I., Santoso, M.B., Mardawati, E., & Setiasih, I.S. (2018). *Pemberdayaan Pengrajin "Pindang Cue" Desa Jayalaksana melalui Tekni Pengemasan*. Jurnal Aplikasi IPTEK untuk Masyarakat. Vol &(2): 14-18.
- Hasan, U., Harianto, & C. Sarwanto. (2019). *Perencanaan Model dan Strategi Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak di Kabupaten Biak Numfor, Papua*. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi KP. 9(2):79-92.
- Huangzhou. Z. (2015). *China Fishing Industry: Current Status, Government Policies and Future Prospect*. CNA Conference Facility. Arlington Virginia.
- Indramadhini, L., & Sitompul, P. (2015). *Pengaruh Kausalitas Ekspor, Impor dan GDP di Indonesia*. Media Ekonomi. 23(1): 11-26.
- Kontan. (2012). *Kurang bahan baku, industri minta impor ikan dibuka*. Retrieved from: <https://industri.kontan.co.id/news/kurang-bahan-baku-industri-minta-impor-ikan-dibuka>.
- Mankiw, N. Gregory. (2013). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2018. (2018). *Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan Dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri*.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018. (2018). *Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri*.
- Petrov, N. I. (2015). *Will we do without foreign products on our table? Standards and Quality*. International Journal of Economics and Financial. Vol 2: 62-67.
- Sabaruddin, S. S. (2014). *Dampak Liberalisasi Perdagangan RI-China terhadap Perubahan Perdagangan dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia: Sebuah Pendekatan Ekuilibrium Parsial (Smart Model) dan Pemanfaatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi 2008*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol XVIII: 33-54.
- Siswanto, E., Sinaga, B. M., & Harianto. (2018). *Dampak Kebijakan Perberasan pada Pasar Beras dan Kesejahteraan Produsen dan Konsumen Beras*. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia. Vol 23(2): 93-100. doi: 10.18343/jipi.23.2.93.
- Suyastri, N. M. (2008). *Pengendalian Impor Kedelai dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional*. Caraka Tani XXIII(2): 61-67.
- Varina, F. (2018). *Dampak Tarif Impor Jagung terhadap Kesejahteraan Pelaku Pasar Jagung Indonesia*. Jurnal Agrosains dan Teknologi Vol 3(1): 47-64.
- Wilujeng, U. H., Mawardi. M.K., & Supriono (2016). *Faktor-Faktor Pertimbangan Penentuan Moda Transportasi Impor Barang pada Perusahaan Importir*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol 39(1),99-108.
- Yanto, R. (2017). *Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process dalam Upaya Peningkatan Kualitas Objek Wisata*. Citec Journal. 4(3): 163-173.